

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury 2003, dalam Mardiasmo, 2006), baik berupa laporan kinerja maupun laporan keuangan.

Proses akuntabilitas dan transparansi yang diupayakan meningkat pada akhir-akhir ini berkaitan dengan pentingnya seluruh lapisan masyarakat dalam mengetahui prestasi yang dicapai oleh aparatur negara dalam menjalankan pemerintahan, agar tersalurnya aspirasi masyarakat mengenai tindakan pemerintah dalam mengelola kepercayaan yang diberikan oleh rakyat selaku pemegang tertinggi kekuasaan negara,

serta membantu bilamana diperlukan perbaikan dalam proses pengelolaan pemerintahan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pentingnya laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang menyajikan informasi sangat dibutuhkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya guna mencapai *Good Government Governance*, dicerminkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3)

Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Fungsi laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan, posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, perubahan posisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas karena, informasi berkualitas yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono,2005 dalam Andra Kusuma, 2014). Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa laporan keuangan untuk TA 2010 terhadap 5 unit organisasi di lingkungan jajaran Kemhan, Mabes TNI serta Mabes Angkatan yang mendapatkan katagori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebab penyusunan laporan keuangan tidak memakai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) malah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan negara Kementrian Keuangan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementrian negara dan lembaga. (<http://dmc.kemhan.go.id/post-menhan-terima-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-atas-laporan-keuangan-kemhan-ta-2010.html>).

Sedangkan pada laporan keuangan TA 2012-2014 Keuangan Menteri Pertahanan (Kemhan) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). Catatan paragraf tambahan tersebut yaitu mengenai sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) yang belum komperhensif dan terintegrasi dengan aplikasi pelaporan data BMN pemerintah pusat. Pembiayaan yang melewati tahun anggaran, penerimaan negara bukan pajak dalam bidang pelayanan masyarakat umum (PNBP Yanmasum) yang waktu itu belum dapat mengikuti UU PNPB, serta hibah yang belum mengikuti aturan yang ada. (<http://dmc.kemhan.go.id/post-bpk-ri-mulai-lakukan-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-kemhantni-html> dan <http://dmc.kemhan.go.id/post-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-ta-2013-bukan-hal-yang-cuma-cuma.html>).

Berdasarkan fenomena diatas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya berkualitas dan belum memiliki nilai atau

manfaat yang sesuai dengan kriteria PP No.71 Tahun 2010. Seperti kriteria keterandalan yang belum terpenuhi padahal keterandalan pelaporan selain berkaitan dengan penyusunan anggaran untuk periode berikutnya. Mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur kualitas informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personal yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Menurut Syafarudin Alwi (2008:15), Kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang.

Fontanella (2010) mengatakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang bermanfaat, maka dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Adanya kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Celviana dan Rahmawati, 2010).

Informasi dalam laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatanwaktuan (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andra Kusuma (2014) dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian terdahulu dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya sedangkan penulis meneliti di Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta dan dari penelitian terdahulu juga variabel dependennya menggunakan nilai informasi pelaporan keuangan sedangkan penulis menggunakan kualitas laporan keuangan instansi.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

‘Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi (Survey Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta)’

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia pada Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta.
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan instansi pada Resimen Artileri Medan Kostrad 2/1 Kostrad Purwakarta.

4. Seberapa besar pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan instansi.
5. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan instansi.
6. Seberapa besar pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan instansi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui kapasitas sumber daya manusia pada Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta.

3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan instansi pada Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan instansi.
5. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan instansi.
6. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan instansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan instansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menjelaskan mengapa faktor kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi.

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan perusahaan khususnya mengenai kualitas laporan keuangan instansi.

Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.